

Imagined Community: Refleksi Kognisi Masyarakat Muda terhadap Identitas Regional ASEAN

Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

186-203

© The Author(s) 2024



Volume 21.2 Juli-Desember 2024

Publikasi *online*: 30 Desember 2024

<https://jisip.jurnaliisipjakarta.id>

Received: 2 Oktober 2024

Revised: 15 Desember 2024

Accepted: 19 Desember 2024

DOI : 10.36451/jisip.v21i2.338

Imagined Community: Reflections on Young People's Cognition of ASEAN Regional Identity

Rachmayani¹

¹ Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta

Corresponding Author:

Rachmayani, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, IISIP Jakarta, Jl. Raya Lenteng Agung No. 32, Jakarta Selatan, Jakarta, 12160, Indonesia

E-mail: rachmayani@iisip.ac.id

Abstrak

Ada anggapan bahwa komunitas ASEAN merupakan *imagined community* yaitu komunitas hanya dalam bayangan hasil dari konstruksi sosial negara anggotanya, bukan proses yang berasal dari keterikatan yang bersifat alamiah. Artikel ini merupakan kajian literatur yang bertujuan menjelaskan dan mengonfirmasi argumen tersebut. Kajian akan diuraikan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori konstruktivisme. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar warga negara anggota ASEAN, khususnya kaum muda, belum memiliki rasa keterikatan dengan komunitas ASEAN, kognisi *we feeling* terhadap ASEAN belum terbangun. Hal tersebut disebabkan belum maksimalnya program edukasi dan promosi nilai-nilai bersama. Temuan tersebut mengonfirmasi berlakunya anggapan atau argumen *imagined community* yang disematkan terhadap ASEAN. Implikasinya untuk mewujudkan sebuah komunitas dan menguatkan identitas regional membutuhkan upaya internalisasi nilai dan norma yang lebih maksimal dengan meminimalisir setiap hambatan yang ada, baik melalui jalur struktur yaitu sumber daya dan norma lembaga ASEAN maupun *agency* yaitu negara-negara anggotanya termasuk warga negaranya.

Kata Kunci

ASEAN way; agen dan struktur; identitas; konstruktivis

Abstract

There is an assumption that the ASEAN community is an imagined community, namely a community only in the imagination of the results of the social construction of its member countries, not a process that comes from natural attachments. This article is a literature review that aims to explain and confirm this argument. The study will be described and analyzed using a constructivism theory. The result of the study shows that most ASEAN member citizens, especially young people, has not had a sense of attachment to the ASEAN community, the cognition of we feeling towards ASEAN has not been built. This is due to the lack of optimal education programs and activities and the promotion of shared values. The findings show that the assumption or argument of the imagined community that is attached to ASEAN is confirmed, that the ASEAN process towards a community and building an identity do not occur naturally. The implication is that realizing a community and strengthening regional identity require efforts to internalize values and norms that are more optimal by minimizing any existing obstacles, both through structural channels, namely the resources and regulations of ASEAN institutions and agencies, namely member countries including their citizens.

Keywords

ASEAN way; agent and structur; constructivism; identity

Pendahuluan

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan asosiasi longgar yang dibangun pada konteks Perang Dingin tahun 1967 oleh 5 negara di Kawasan Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore dan Filipina. Organisasi *intergovernmental* ini merupakan bentuk konsolidasi politik negara berkembang yang berusaha memperkuat diri pada situasi pertarungan dua kekuatan besar pada masa itu, yaitu kekuatan Amerika Serikat yang mengusung ideologi liberalisme dan Uni Soviet dengan ideologi sosialis. Tujuan utama berdirinya organisasi ini adalah untuk mempromosikan stabilitas dan perdamaian kawasan (*The Founding of ASEAN*, n.d.). Disamping itu, berdirinya ASEAN juga bertujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan sosial budaya antar negara di kawasan Asia Tenggara. Seiring berjalannya waktu, ASEAN semakin berkembang, baik pada aspek kelembagaan maupun keanggotaan. Melihat ASEAN hari ini, jumlah anggota telah mencapai 10 negara, sedangkan pada aspek kelembagaan, ASEAN memiliki perubahan yang sangat signifikan. Dalam perkembangan selanjutnya, ASEAN bersepakat untuk membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu masyarakat negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, dan terikat bersama dalam kemitraan dinamis di tahun 2020. Untuk mewujudkannya, ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yaitu menyepakati pembentukan Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*). Masyarakat ASEAN terdiri atas tiga pilar, yaitu Pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community/APSC*), Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*), dan Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*). Ketiga pilar ini sebenarnya

telah tercantum dalam piagam ASEAN, disebutkan bahwa Masyarakat ASEAN ditopang oleh tiga pilar utama yang telah disebutkan sebelumnya. Ketiga pilar Masyarakat ASEAN ini terikat secara erat dan saling memperkuat untuk mewujudkan perdamaian, kestabilan dan kesejahteraan bersama yang abadi (Indonesia, 2015).

Tahun 2008 merupakan tonggak bersejarah ketika ASEAN melahirkan sebuah piagam (*ASEAN charter*), yang menandakan ASEAN sebagai organisasi yang memiliki *legal personality* (keabsahan hukum), bukan lagi asosiasi kerjasama yang bersifat longgar (Najmasani, 2023). Kelembagaan ASEAN pun semakin berkembang, salah satunya dengan berdirinya sebuah lembaga yang bernama *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, selanjutnya disingkat AICHR. AICHR dibentuk pada tahun 2009 yang dirancang untuk menjadi bagian integral dari struktur organisasi ASEAN dan merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab menyeluruh atas pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (Nonthasoot, 2019). Proses pengambilan keputusan di Lembaga AICHR mengacu pada cara ASEAN, yaitu melalui konsensus dan konsultatif (Chua & Lim, 2017). Pada tahun 2012 diadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN. Hal ini semakin memperkuat komitmen ASEAN untuk mengeratkan kerjasama di bidang hak asasi manusia dan mencari jalan penyelesaian ketika ada masalah HAM yang menimpa negara anggotanya. Salah satu masalah HAM yang saat ini sedang terjadi dan diupayakan penyelesaiannya oleh ASEAN dan AICHR adalah masalah etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar, salah satu negara anggota ASEAN.

Cita-cita ASEAN menuju komunitas atau masyarakat ASEAN semakin terwujud seiring dengan dibangunnya identitas ASEAN. Identitas ASEAN adalah jalan menuju impian bersama untuk mewujudkan masyarakat ASEAN yang dirangkum dalam kombinasi yang cerdas dan seimbang antara nilai-nilai, ambisi dan visi bersama yang akan memperkuat dan merekatkan ikatan masyarakat ASEAN (Suriyadi, 2021). ASEAN menerapkan prinsip dalam organisasi yang disebut juga *ASEAN way*, yaitu metode diplomasi negara anggota ASEAN dalam menjalankan fungsi organisasinya. *ASEAN way* memiliki enam prinsip yaitu saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, dan identitas nasional semua negara; hak setiap negara untuk menjalankan eksistensi nasionalnya secara bebas dari campur tangan, subversi, atau paksaan dari luar; tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing (Kivimäki, 2011). Prinsip ini juga yang kemudian membentuk identitas ASEAN sebagai suatu bentuk komunitas yang inklusif, saling menghargai satu sama lain, dan senantiasa berdialog dalam mencapai kesepakatan atau konsensus. Upaya ASEAN untuk mencapai cita-citanya menuju komunitas ASEAN bukanlah hal yang mudah. Begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh ASEAN, terutama adanya perbedaan atau keanekaragaman dari negara-negara anggota ASEAN itu sendiri, seperti perbedaan budaya, bahasa, sistem pendidikan, tingkat perekonomian, hingga perbedaan sistem politik. Selain itu, program promosi dan edukasi melalui pendidikan yang dilakukan oleh ASEAN juga memiliki tantangan tersendiri seperti adanya perbedaan bahasa dan budaya. Oleh sebab itu, komunitas ASEAN acapkali disebut sebagai *imagined community*, yaitu komunitas yang dibangun melalui

proses imaginasi kolektif, bukan proses interaksi secara langsung (*Engl56_Kj_Anderson_Communities.Pdf*, n.d.). Anggapan ini didasarkan pada sejarah ASEAN yang dibentuk oleh negara-negara yang pada saat itu memiliki pandangan dunia yang dipengaruhi oleh situasi perang dingin. Adanya perbedaan ideologi dan system politik yang mencolok saat itu menjadi tantangan besar bagi ASEAN untuk berproses menjadi sebuah komunitas. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pandangan dunia ini ikut berubah, ASEAN bergerak menuju komunitas yang lebih inklusif dan membangun identitasnya sendiri dengan latar belakang yang beranekaragam tersebut (Faridy, 2020).

Permasalahan identitas ASEAN telah banyak dikaji diantaranya ialah: Pertama, tulisan Donald E. Weatherbee dalam bukunya yang berjudul *International Relations in Southeast Asia: the Struggle of Autonomi*. Weatherbee seorang pakar terkemuka dalam studi hubungan internasional di Asia Tenggara. Dalam tulisannya, ia menjelaskan tentang upaya negara-negara Asia Tenggara untuk mencapai dan mempertahankan otonomi mereka dalam konteks geopolitik yang kompleks. Ia juga menyoroti peran ASEAN dalam memfasilitasi kerjasama regional dan bagaimana fungsinya sebagai *platform* bagi anggotanya untuk menavigasi tantangan eksternal. Dalam konteks identitas dan komunitas ASEAN, Weatherbee menyatakan bahwa ASEAN adalah sebuah konstruksi yang mengandalkan ide-ide kebersamaan, meskipun negara-negara anggotanya sangat berbeda secara budaya, politik, dan ekonomi. Hal ini mencerminkan bagaimana ASEAN sebagai sebuah entitas lebih bersifat “dibayangkan” daripada realitas yang konkret. Meskipun Weatherbee tidak secara eksplisit menggunakan istilah “*imagined community*” dalam analisisnya tentang ASEAN, konsep ini dapat diterapkan untuk memahami bagaimana ASEAN membangun identitas regional. Dengan latar belakang perbedaan budaya, politik, dan ekonomi yang signifikan, negara-negara anggota ASEAN telah berupaya membentuk rasa kebersamaan dan identitas kolektif mereka, seperti norma ASEAN way yang menjadi pedoman negara anggotanya dalam bertindak (Donald, 1992).

Artikel kedua ditulis oleh Prof. Dr. Phan Thi Hong Xuan dengan judul *Raising the Awareness of Southeast Asian Identity*. Tulisan ini membahas tentang pembentukan dan pengembangan ASEAN, identitas budaya dan sosial-ekonominya, pengaruh budaya barat, dan upaya untuk menciptakan identitas ASEAN yang bersatu. Tulisan ini juga menyoroti pentingnya pelestarian budaya, pendidikan, dan kegiatan masyarakat dalam menumbuhkan rasa identitas ASEAN di antara warga negaranya. Dalam penelitian ini, terdapat data survei yang dilakukan oleh penulisnya, data terdiri dari *sample* 140 anak muda ASEAN yang mengisi sejumlah 20 pertanyaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat muda memahami tentang pentingnya kerjasama regional, identitas ASEAN sering kali dipandang abstrak dibandingkan dengan identitas nasional. Temuan penelitian dalam tulisan ini menyarankan promosi nilai-nilai bersama seperti keberagaman budaya dan inklusivitas, serta pendekatan berbasis lokal seperti penggunaan bahasa lokal dan program pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan inisiatif lintas budaya dan pertukaran pemuda untuk memperkuat identitas bersama. Tulisan ini mencoba

membangun kesadaran dan pemahaman tentang ASEAN di kalangan pemuda Asia Tenggara dan memberikan saran untuk meningkatkan kesadaran akan identitas ASEAN (Prof. Dr. Phan Thi Hong Xuan, 2016).

Tulisan ketiga yang menjadi referensi adalah sebuah penelitian dari ASEAN *Youth Development Index* pada tahun 2020. Indeks Pembangunan Pemuda ASEAN (YDI) awalnya dibentuk untuk menilai pembangunan pemuda di seluruh Negara Anggota ASEAN. YDI kemudian aktif melakukan riset terkait peran pemuda dalam proses penguatan identitas ASEAN. Penelitian pada tahun 2020 ini berjudul *Understanding How Young People See ASEAN* yang mencakup 2.000 mahasiswa dari 10 negara ASEAN. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara nilai, kesadaran, dan identitas ASEAN dalam pandangan pemuda ASEAN. Pemuda didefinisikan sebagai individu berusia 15-35 tahun yang dianggap memiliki peranan penting bagi masa depan ASEAN. Kesadaran, nilai-nilai, dan identitas mereka sangat penting bagi upaya pembangunan dan penguatan komunitas ASEAN. Hasil riset menemukan bahwa kesadaran pemuda tentang ASEAN tidak selalu berbanding lurus dengan rasa keterikatan atau identitas positif terhadap ASEAN itu sendiri. Sebagian besar mahasiswa dari sepuluh negara ASEAN dalam hasil survei mengetahui tentang Lembaga ASEAN melalui pendidikan formal, tetapi informasi ini sering kurang mendalam. Hasil penelitian menyoroti perlunya pendekatan berbasis nilai yang merayakan keragaman budaya dan ekonomi, serta perlunya strategi lokal untuk menyampaikan pesan ASEAN dalam bahasa lokal. Hal ini penting untuk membangun rasa keterlibatan yang lebih kuat di kalangan pemuda (Version, 2021).

Dari ketiga referensi di atas, tulisan pertama fokus mencoba membangun argumentasi bahwa ASEAN merupakan sebuah komunitas yang dibayangkan ketimbang realitas yang nyata, sedangkan dua tulisan lainnya berfokus pada riset mengenai pembentukan dan pengembangan identitas ASEAN menuju sebuah komunitas, dengan fokus riset pada masyarakat muda ASEAN. Dari tiga artikel di atas penulis melihat ada sebuah benang merah antara argumentasi ASEAN sebagai sebuah komunitas yang dibayangkan dengan kognisi masyarakat muda ASEAN yang cukup rendah terhadap rasa kepemilikan ASEAN. Namun, bukti empiris tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa kebenaran *imagined community* terhadap ASEAN. Dengan gambaran tersebut diperlukan banyak bukti yang representatif, oleh karena itu artikel ini akan difokuskan untuk melakukan suatu kajian yang menambah bukti argumen *imagined community* terhadap ASEAN dengan cara menelusuri kognisi masyarakat mudanya terhadap rasa kepemilikan akan ASEAN. Peran pemuda penting karena mereka adalah pemegang estafet kepemimpinan ASEAN, mereka lambang kemajuan, inovasi, dan kreatifitas serta basis kekuatan suatu negara maupun komunitas regional. Kemudian untuk membedakannya dengan kedua hasil riset di atas, penulis mencoba melihat sejauh mana ASEAN dan negara anggotanya telah melakukan proses internalisasi nilai dan identitas ASEAN, program apa yang sudah mereka jalankan dan apa saja hambatan yang dihadapi.

Untuk menjelaskan dan menganalisis proses internalisasi nilai dan identitas ASEAN

terutama pada kalangan anak muda ASEAN, penulis menggunakan perspektif konstruktivisme, yakni salah satu perspektif dominan dalam studi Hubungan Internasional. Menurut Alexander Wendt, asumsi dasar konstruktivisme menekankan pada struktur sosial, ide, norma, dan identitas yang memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan interaksi antar negara (Wendt, 2005). Struktur atau dimensi sosial dalam pemaknaan konstruktivis adalah sesuatu yang tidak kasat mata, yakni berupa gagasan (Rosyidin, 2015). Pandangan tentang gagasan ini kontras dengan realisme dan liberalisme dalam studi hubungan internasional yang menekankan aspek material pada interaksi mereka. Kaum konstruktivis juga mengatakan bahwa dimensi gagasan ini lebih penting ketimbang dimensi material dan bahwa identitas dan kepentingan ditentukan oleh gagasan tersebut ketimbang seperti apa adanya (Wendt, 2005). Hal ini menggambarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi secara kasat mata selalu ada penjelasan akan makna yang terkandung di dalamnya. Asumsi dasar lainnya dari perspektif konstruktivisme adalah mengenai hubungan antara agen-struktur sebagai dua entitas yang saling memengaruhi dan membentuk satu sama lain (Rosyidin, 2015). Struktur sosial tercipta karena adanya tindakan agen sedangkan tindakan agen dipengaruhi oleh struktur tersebut melalui interaksi sosial yang dinamis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wendt bahwa konstruktivisme menekankan pada peranan norma dan identitas yang akan menentukan perilaku dan interaksi antar aktor.

Konsep norma dalam pandangan konstruktivis diadopsi dari pemikiran sosiologis yang didefinisikan oleh Martha Finnemore sebagai “harapan-harapan bersama yang dianut oleh sekumpulan aktor melalui perilaku yang pantas” (Finnemore, 1996). Aktor hubungan internasional terutama negara dalam menjalin relasinya melakukan tindakan-tindakan yang dituntun oleh norma. Norma tersebut termanifestasi dalam bentuk aturan yang telah disepakati bersama. Lebih lanjut, norma erat kaitannya dengan standar perilaku yang pantas atau pedoman yang menentukan hal yang baik dan buruk yang kemudian mendorong aktor hubungan internasional untuk melaksanakannya. Namun, norma sendiri tidak muncul tiba-tiba melainkan ia merupakan hasil dari interaksi sosial yang dibangun dari waktu ke waktu dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dalam suatu negara. Menurut Finnemore dan Sikkink, norma memiliki tiga tahap “daur hidup” yakni tahap kemunculan, tahap penyebarluasan, dan tahap internalisasi (Finnemore & Sikkink, 2017). Ketiga tahap ini prosesnya didorong oleh agen baik negara maupun non-negara dan kemudian mendorong munculnya norma. Norma kemudian mengalami proses penyebarluasan dan internalisasi ke dalam struktur aktor negara maupun non-negara sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Ketika norma terinternalisasi dan termanifestasi dalam lembaga, ia kemudian dapat menjadi kekuatan yang menentukan tindakan negara.

Dalam konteks ASEAN, ASEAN way memuat salah satu prinsip dalam metode diplomasi ASEAN yakni prinsip non-interferensi. Prinsip ini merupakan mekanisme atau cara negara anggotanya dalam menjalin Kerjasama regional. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip tersebut merupakan bentuk norma yang menjadi standar negara-negara ASEAN dalam berperilaku atau

mengambil sebuah tindakan. Selain itu, adanya norma hak asasi manusia yang terlembaga dalam AICHR juga menjadi standar bagi negara-negara anggotanya dalam berperilaku terkait isu yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan. Dalam proses tahap norma yang telah dijelaskan sebelumnya, norma dalam ASEAN baik pada *ASEAN way* maupun pada norma HAM ASEAN juga melalui tahapan penyebarluasan dan internalisasi. Karena ASEAN sebagai sebuah organisasi atau agen bertanggungjawab menyebarluaskan dan menginternalisasi norma yang dianut oleh mereka, maka norma tersebut harus diinternalisasi oleh ASEAN ke dalam negara-negara anggotanya beserta seluruh masyarakatnya. Kaitannya dengan logika agen dan struktur yang telah dijelaskan di atas maka norma atau *ASEAN way* merupakan bentuk dari struktur itu sendiri sedangkan ASEAN dan negara anggotanya adalah agen bahwa norma (*ASEAN way*) dan agen (ASEAN dan negara anggotanya) saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain, dari waktu ke waktu.

Konsep selanjutnya yang akan dibahas yaitu identitas, konsep yang juga sama pentingnya dengan konsep norma. Identitas menurut konstruktivis adalah atribut atau karakteristik yang melekat pada diri aktor yang berfungsi untuk membedakan atau mengidentifikasi diri dengan pihak lain. Kaum konstruktivis meyakini bahwa identitas bukanlah hal yang muncul di ruang hampa, juga bukan hal yang statis sepanjang waktu (Mohamad Rosyidin, n.d.) Sebagaimana norma yang muncul dari interaksi sosial dan berproses, identitas juga senantiasa dinamis dan mengalami proses *social*, perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Norma dan identitas ini saling berkaitan satu sama lain. Sementara itu, pada level relasi agen dan struktur dalam konteks ASEAN yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *ASEAN way* adalah norma atau struktur yang memengaruhi agen (ASEAN, negara anggota, dan masyarakatnya), sedangkan identitas ASEAN merupakan produk yang dihasilkan oleh agen. Agen berperan aktif dalam membentuk identitas ASEAN. Identitas ASEAN dalam hal ini tidaklah sama dengan *ASEAN way*, meskipun sejatinya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip atau elemen *ASEAN way* itu sendiri, seperti nilai saling menghormati kedaulatan, nilai budaya, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa norma berada pada level struktur dan identitas pada level agen, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain lewat interaksi sosial.

Konsep selanjutnya yang digunakan dalam artikel ini untuk menganalisis pandangan dunia masyarakat muda terhadap nilai dan identitas ASEAN adalah konsep kognisi, secara umum merupakan dasar dari bagaimana manusia memahami dunia dan berinteraksi dengan lingkungannya, sedangkan dalam buku Psikologi Komunikasi karya Jalaluddin Rakhmat, konsep kognisi dijelaskan sebagai proses mental yang berkaitan dengan bagaimana individu menerima, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasi yang mereka peroleh dari lingkungan (Rakhmat, 2011).

Metode

Tulisan dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur.

Menurut Cresswell, pendekatan kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna (*meaning*) yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (Bakry, 2016). Proses penelitian kualitatif melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif, dan peneliti memberikan interpretasi mengenai makna dari data yang diperoleh (Bakry, 2016).

Pengumpulan bahan pengkajian dilakukan melalui berbagai tulisan dalam buku, jurnal penelitian, dokumen laporan lembaga dan hasil penelitian. Hasil penelitian yang digunakan ialah hasil penelitian regional dan lokal. Hasil penelitian regional, bersumber dari Asia Barometer Survey, ASEAN *Awareness Survey* oleh ASEAN Foundation, ISEAS-Yusof Ishak Institute Survey, ASEAN *Youth Development Index* (YDI). Hasil penelitian lokal yang disajikan merupakan hasil survei lokal dari tiga tempat kota di Indonesia, yaitu Depok, Bogor dan Maluku Tengah. Penelitian dilakukan bulan Juli 2024 dengan metode survei oleh dua orang mahasiswa hubungan internasional IISIP Jakarta, yaitu Piet Samuel Syauta dan Joy Apriano Sinulingga yang memfokuskan pada “Peran ASEAN dan ICHR penyelesaian kasus etnis Rohingya”. Responden dipilih dengan non random yang termasuk generasi Z, dengan rentang usia 15-18 tahun. Pemilihan gen Z sebagai responden karena mereka adalah generasi kaum muda yang hidup di era perkembangan pesat majunya teknologi digital dan informasi sehingga disebut juga generasi net (Pratikto & Kristanty, 2017). Tidak hanya itu, mereka juga adaptif dan berpikir kritis terhadap informasi yang mereka dapat (Pandu, 2023). Karakter tersebut memungkinkan mereka bisa mengakses informasi dan mengadaptasinya secara luas termasuk tentang ASEAN.

Hasil dan Pembahasan

ASEAN sebagai imagined community

Sulit ditelusuri siapa pakar atau akademisi yang pertama kali menyebut ASEAN sebagai *imagined community*, namun pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa akademisi yang menerapkan gagasan ini dalam konteks ASEAN. Sebelum memaparkan gagasan akademisi tersebut, perlu dijelaskan tentang istilah *imagined community* itu sendiri. *imagined community* merupakan teori yang diperkenalkan oleh Benedict Anderson dalam bukunya *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (1983). Anderson menggunakan istilah ini untuk menjelaskan bagaimana bangsa-bangsa modern dikonstruksi secara sosial melalui simbol, narasi, dan pengalaman bersama, meskipun meskipun anggotanya tidak saling mengenal secara langsung (*Engl56_Kj_Anderson_Communities.Pdf*, n.d.). Konsep ini kemudian digunakan oleh pakar lain untuk menjelaskan sebuah komunitas regional, yakni ASEAN. Salah satu akademisi yang menyebut ASEAN sebagai *imagined communities* adalah Amitav Acharya dalam tulisannya yang berjudul *Constructing a Security Community in Southeast Asia*. Amitav Acharya membahas bagaimana ASEAN membentuk identitas regional melalui interaksi sosial dan norma kolektif, meskipun anggotanya tidak memiliki kesamaan budaya atau sejarah yang mendalam. Identitas ini

terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung dalam konteks institusional ASEAN (Acharya, 2021). Akademisi lain yang menyebut ASEAN sebagai *imagined communities* adalah Lee Jones dalam artikelnya yang berjudul *ASEAN's unchanged melody? The theory and practice of 'non-interference' in Southeast Asia*. Tulisan Lee Jones cenderung mengkritisi konsep ASEAN sebagai *imagined community*, dengan menyoroti bahwa komunitas ASEAN sering lebih bersifat elit dan kurang menyentuh pada tingkat masyarakat umum (Jones, 2010).

Dalam konteks ASEAN, gagasan *imagined community* diterapkan oleh sejumlah akademisi yang menganalisis bagaimana identitas regional ASEAN dibentuk sebagai komunitas yang “dibayangkan” melalui berbagai inisiatif, seperti simbol-simbol regional, kerja sama ekonomi, sosial, budaya, dan bidang pendidikan. Pada aspek simbol, organisasi ASEAN memiliki lambang bendera dan lagu “the ASEAN way” yang menjadi simbol solidaritas masyarakat ASEAN. Pada aspek kerja sama, ASEAN adalah organisasi yang fungsinya dijalankan oleh negara dalam hal ini elit pemerintahan negara anggota ASEAN. Seperti tercermin dalam pertemuan resmi ASEAN dalam forum Konferensi Tingkat tinggi (KTT) yang diselenggarakan secara reguler (<https://asean2023.id/id/news/getting-to-know-the-asean-summits-in-indonesia-from-year-to-year>). Penyelenggaraan forum KTT ASEAN bertujuan mempertemukan para pemimpin ASEAN dalam rangka menjalin kerja sama, baik kerja sama politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan lain dari penyelenggaraan KTT ini adalah untuk memperkuat integrasi regional ASEAN serta penguatan visi dan misi ASEAN. Pertemuan demi pertemuan yang diselenggarakan melalui KTT ASEAN merupakan suatu proses konstruksi *social* yang di dorong oleh kepentingan negara anggotanya. Dalam konteks ini, logika konstruktivisme dapat diuraikan dengan menjelaskan relasi antara agen dan struktur dalam ASEAN. ASEAN, lembaga, negara anggotanya, dan masyarakat sipil ASEAN berada pada level agen dan ASEAN way, piagam ASEAN dan forum-forum ASEAN pada level struktur.

Dalam setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh ASEAN di berbagai forum formal maupun tidak formal, baik antar pemimpin negara anggotanya, maupun dengan negara mitra, akan terjalin sebuah relasi yang dinamis. Relasi ini mencerminkan interaksi antara individu atau entitas pengambil kebijakan dalam kerangka kelembagaan ASEAN. Interaksi ini terjadi melalui proses komunikasi, konsultasi, dialog, dan negoisasi yang bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan atau konsensus tertentu. Agen memiliki otonomi untuk menyusun suatu kebijakan, namun tindakan mereka dibatasi oleh norma dan struktur ASEAN. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada level struktur dalam konteks ASEAN terdapat norma ASEAN way dan piagam ASEAN yang menjadi pedoman bagi agen dalam bertindak maupun pengambil suatu kebijakan. Namun, negara anggota dapat mengubah struktur seperti memberikan rekomendasi untuk memperkuat norma ASEAN, atau peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Jadi dalam hal ini relasi agen dan struktur dapat saling memengaruhi satu sama lain, agen memengaruhi struktur dan struktur memengaruhi agen. Seperti pertemuan dalam KTT ASEAN yang diselenggarakan secara berkesinambungan, struktur forum ASEAN menjadi platform bagi agen untuk menyuarakan

kepentingan masing-masing negara yang harus selaras dengan tujuan regional. Agen juga bekerja dalam struktur untuk merancang kebijakan-kebijakan yang bersifat kolektif. Penjelasan di atas didominasi oleh negara sebagai agen, meskipun faktanya peran masyarakat sipil seperti NGO di negara-negara ASEAN juga turut andil dalam dinamika pengambilan kebijakan ASEAN, seperti memberikan masukan atau rekomendasi terkait isu yang terjadi di masing-masing negara mereka (Chandra et al., 2015). Jadi dapat disimpulkan bahwa relasi agen dan struktur dalam ASEAN bersifat simbiosis. Struktur memberikan kerangka kerja yang stabil, sementara agen berperan untuk memperbaharui dan memperkuat struktur melalui konsensus.

Dalam konteks penguatan identitas regional ASEAN, relasi antara agen dan struktur yang terjalin dalam berbagai forum, termasuk KTT ASEAN, mereka saling memengaruhi untuk menciptakan identitas ASEAN menuju komunitas satu ASEAN. Misalnya pada bidang budaya, adanya kegiatan penyelenggaraan festival budaya dan film ASEAN merupakan bagian dari konstruksi social antara masyarakat negara-negara ASEAN, sedangkan pada bidang pendidikan, yaitu adanya program pertukaran pelajar antar negara ASEAN menjadi wadah bagi kaum muda untuk saling berinteraksi mengenal satu sama lain. Dari penjelasan di atas, konsep *imagined communities* Anderson yang disematkan pada konteks ASEAN menemukan relevansinya. Melihat latar belakang negara anggota ASEAN yang beranekaragaman baik dari sisi ideologi, sosial, bahasa, agama, budaya, dan politik sulit untuk mencapai satu identitas secara alami. Oleh karena itu, identitas ASEAN perlu dikonstruksi melalui narasi simbolisme dan kerjasama sebagaimana dijelaskan diatas. Faktor lain yang menunjukkan bahwa identitas ASEAN dibangun bukan melalui cara yang alami adalah fakta bahwa tidak ada entitas politik tunggal dalam tubuh ASEAN. ASEAN dibentuk sebagai wadah kerjasama yang bersifat *intergovernmental* yang artinya setiap negara anggota tetap memiliki kedaulatan secara penuh, sehingga komunitas ASEAN lebih bersifat simbolis daripada nyata dalam pengertian politik dan sosial. Selain itu, proses integrasi ASEAN yang bertahap dan senantiasa bersandar pada nilai atau prinsip *non-interference* (tidak campur tangan) dan *consensus* (kesepakatan bersama) membuatnya lebih sebagai forum kerja sama daripada komunitas yang terintegrasi secara mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas ASEAN lebih merupakan impian atau cita-cita daripada sebuah realitas.

Dari perspektif konstruktivisme, pembangunan identitas menuju komunitas ASEAN tidak hanya didasarkan pada ikatan fisik atau realitas objektif, melainkan pada pemahaman dan kesepakatan yang dibangun bersama. Melalui proses konstruksi sosial antar agen dan struktur, mereka saling menciptakan makna dan identitas secara bersama-sama, seringkali melalui komunikasi yang melibatkan media, bahasa, dan budaya yang disebarkan secara luas (Acharya, 2021). Perspektif konstruktivis menekankan bahwa identitas kolektif dan rasa kesatuan dalam pembangunan komunitas ASEAN bukanlah sesuatu yang sudah ada sebelumnya, tetapi dibentuk secara sosial, historis, dan terus berkembang. Sehingga dalam pandangan konstruktivisme, konsep "*imagined communities*" yang dikemukakan oleh Benedict Anderson menjelaskan bahwa bangsa atau komunitas terbentuk bukan karena ikatan fisik, melainkan karena narasi sosial

yang dibangun bersama. Identitas kolektif ini dibentuk melalui komunikasi, media, bahasa, dan budaya yang membentuk rasa kebersamaan, meskipun anggotanya tidak saling mengenal secara langsung. Dengan demikian, komunitas seperti ASEAN juga bisa dianggap sebagai komunitas yang dibayangkan, terbentuk melalui interaksi sosial dan simbolis yang saling terkait satu sama lain.

Kognisi Masyarakat Muda ASEAN dalam membangun identitas regional ASEAN

Bagian tulisan ini akan mengurai dan menganalisis kognisi, dan pemahaman (pandangan dunia) pemuda ASEAN terhadap nilai dan identitas ASEAN. Sebagai organisasi regional yang telah berdiri selama 57 tahun dan terus berkembang baik struktur maupun fungsinya. ASEAN terus berupaya membangun identitas sebagai satu komunitas ASEAN. Melalui ASEAN, masyarakat membangun seperangkat nilai yang dibangun di atas nilai-nilai bersama yang telah lama dianut oleh Masyarakat ASEAN. Nilai-nilai ini tercermin dalam Pasal 2 Piagam ASEAN yaitu: rasa hormat, perdamaian dan keamanan, kesejahteraan, non-intervensi, konsultasi/dialog, kepatuhan terhadap hukum internasional dan aturan perdagangan, demokrasi, kebebasan, kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, persatuan dalam keberagaman, inklusivitas, dan sentralitas ASEAN dalam menjalankan hubungan eksternal (Chua & Lim, 2017). Nilai-nilai bersama tersebut yang kemudian dibangun dan menjadi dasar dari “Identitas ASEAN” yang dibayangkan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, proses terbentuknya identitas ASEAN merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang panjang antar negara anggota dan masyarakatnya. Nilai-nilai bersama yang dianut oleh masyarakat ASEAN seperti telah disebutkan di atas terkesan abstrak karena sifatnya berupa prinsip atau pedoman moral yang tidak memiliki bentuk fisik atau tindakan langsung. Namun, ASEAN telah berupaya melakukan manifestasi praktis terhadap nilai-nilai tersebut ke dalam mekanisme yang lebih konkret seperti kebijakan atau kerangka kerja. Misalnya untuk nilai non-intervensi, sikap negara anggota ASEAN jelas tidak mau mencampuri urusan internal anggotanya. Kemudian dalam proses pengambilan kebijakan regional, negara anggota melalui mekanisme konsensus yaitu memutuskan suatu keputusan hasil persetujuan semua anggota tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Suriyadi, 2021). Namun pada praktiknya, implementasi nilai-nilai tersebut belum berjalan maksimal, adanya tantangan-tantangan dalam penerapan nilai tersebut membuatnya terkesan abstrak. Adanya perbedaan kepentingan nasional, kesenjangan ekonomi antarnegara, dan konflik-konflik regional membuat nilai tersebut sulit diimplementasikan secara penuh. Akan tetapi, ASEAN berupaya untuk senantiasa menjaga relevansi dan kohesinya melalui dialog dan kerjasama. Nilai-nilai ini bahkan memungkinkan ASEAN untuk mempertahankan stabilitas regional dan perdamaian internasional.

ASEAN yang dinamis dan terbuka memiliki slogan “*one vision, one identity, one community*”, atau “satu visi, satu identitas, dan satu komunitas” yang merupakan cita-cita ASEAN menuju satu komunitas ASEAN (asean2023.id). Cita-cita yang terkandung dalam slogan ini menggambarkan bagaimana ASEAN berupaya untuk menjadi organisasi yang bukan hanya melayani kepentingan

negara atau kepentingan bisnis saja, tapi ingin menjadi wadah bagi seluruh kepentingan masyarakat negara-negara anggota ASEAN (berorientasi masyarakat). Sehingga upaya tersebut harus ditindaklanjuti dengan adanya internalisasi nilai dan norma ASEAN itu sendiri, mulai dari pengenalan tentang ASEAN, visi-misinya, peran dan fungsinya, serta isu-isu yang ada dalam cakupan ASEAN (Kivimäki, 2011). Proses internalisasi ini dapat dilakukan oleh agen atau actor ASEAN sebagai organisasi, negara-negara Asia Tenggara sebagai anggota ASEAN, dan kelompok masyarakat yang sama-sama memiliki kepentingan untuk menyebarluaskan dan menginternalisasi nilai dan norma ASEAN. Fokus dalam artikel ini adalah melihat pemahaman kaum muda ASEAN terhadap nilai dan identitas ASEAN. Kaum muda adalah generasi penting bagi ASEAN, perannya sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan ASEAN di berbagai bidang, terlebih lagi dalam konteks penguatan nilai dan identitas ASEAN menuju cita-cita satu komunitas ASEAN. Terdapat beberapa riset mengenai pemahaman masyarakat ASEAN dalam konteks penguatan identitas ASEAN, baik dalam lingkup regional maupun lokal.

Dari empat hasil penelitian regional (Tabel 1) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat ASEAN, khususnya kaum muda belum sepenuhnya memiliki rasa keterikatan dengan komunitas ASEAN. Artinya internalisasi nilai, norma dan identitas ASEAN tidak berjalan dengan cukup baik. Relasi agen dan struktur dalam konteks ASEAN belum mampu mencapai pengaruh yang signifikan dalam membangun nilai dan identitas tersebut ke dalam diri dan pandangan dunia masyarakat ASEAN. Padahal ASEAN telah berupaya melakukan internalisasi nilai dan identitasnya melalui berbagai program, diantaranya : (1) ASEAN Festival, kegiatan ini mencakup festival seni dan budaya, festival musik dan film, hingga festival makanan. Program festival budaya ASEAN diselenggarakan secara bergilir di kota-kota negara anggotanya (kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif.go.id); (2) ASEAN University Network (AUN) meliputi program pertukaran pelajar dan dosen di antara universitas negara anggota ASEAN (aunsec.org); (3) Program pengembangan kurikulum tentang ASEAN di sekolah; (4) ASEAN goes to schools program yang dirancang untuk mengenalkan nilai-nilai ASEAN ke pelajar di Jakarta (asean2023.id).

Tabel 1. Hasil Penelitian Terkait Identitas ASEAN di kawasan Regional

No.	Penelitian	Tahun	Hasil
1.	Asia Barometer Survey (Huang & Weatherall, 2019).	2014	Survei ini mengungkapkan bahwa hanya sekitar 30% masyarakat ASEAN yang merasa memiliki rasa keterikatan dengan identitas regional. Sebagian besar responden lebih mengidentifikasi diri berdasarkan latar belakang nasional atau etnis mereka
2.	ASEAN Awareness Survey oleh ASEAN Foundation (https://asean.org/poll-on-asean-awareness-2018/).	(2018)	Survei ini menemukan bahwa meskipun sebagian besar responden mengenal nama ASEAN, mereka tidak memahami tujuan atau manfaat konkret dari organisasi tersebut. Selain itu, tingkat pemahaman tentang Komunitas ASEAN lebih tinggi di negara-negara seperti Singapura dan Malaysia dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Kawasan

<p>3. ISEAS-Yusof Ishak Institute Survey (Seah et al., 2023) 2023</p>	<p>Laporan tahunan <i>The State of Southeast Asia</i> yang melibatkan 1.308 responden dari 10 negara anggota ASEAN menyebutkan bahwa meskipun ASEAN memiliki relevansi geopolitik, kesadaran masyarakat terhadap identitas ASEAN masih rendah. Mayoritas masyarakat Asia Tenggara cenderung lebih terikat pada identitas nasional dibandingkan dengan identitas regional. Misalnya, hanya sebagian kecil responden yang merasa ASEAN sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.</p>
<p>4. ASEAN Youth Development Index (YDI) (<i>Asean Youth Development Development</i>, n.d.) 2021</p>	<p>Riset berjudul <i>ASEAN Awareness, Values, and Identity</i> ini menunjukkan tingkat kesadaran dan hubungan anak muda terhadap ASEAN, termasuk persepsi mereka tentang nilai-nilai bersama, kebanggaan regional, dan rasa memiliki terhadap identitas ASEAN.</p> <p>Beberapa temuan utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran tentang ASEAN: Mayoritas pemuda di ASEAN memahami pentingnya organisasi ini dalam menciptakan kerja sama regional, tetapi tingkat kesadaran spesifik terhadap program dan kebijakan ASEAN masih bervariasi di tiap negara anggota. 2. Nilai-nilai bersama: Pemuda ASEAN menunjukkan penghargaan terhadap nilai seperti toleransi, inklusivitas, dan saling menghormati budaya, namun belum sepenuhnya memahami nilai tersebut. 3. Identitas ASEAN: Banyak anak muda merasa identitas ASEAN adalah tambahan bagi identitas nasional mereka, tetapi ada kebutuhan untuk memperkuat rasa kebersamaan lintas batas negara.

Sumber : Olahan Penulis

Program promosi dan edukasi yang dilakukan dapat dimaknai bahwa ASEAN cukup serius dalam upaya menuju satu komunitas ASEAN dengan berupaya membangun nilai dan identitasnya. Pada program edukasi yaitu pengembangan kurikulum ASEAN, beberapa negara anggota telah mengintegrasikan bahan ajar atau materi tentang ASEAN ke dalam kurikulum mereka. Di antaranya ada Filipina, Singapore, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Meskipun tingkat integrasi bahan ajar ini berbeda-beda, namun beberapa negara telah memiliki program yang lebih terstruktur dan meluas seperti Indonesia, Singapura, dan Filipina. Sementara, negara lain mungkin hanya mencakup topik ASEAN sebagai bagian dari mata pelajaran yang lebih luas. Catatan penting di sini adalah telah ada upaya edukasi resmi melalui sistem pendidikan negara anggota ASEAN dalam internalisasi nilai dan identitas ASEAN. Meskipun perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat bagaimana proses edukasi tersebut, apakah berjalan dengan maksimal atau tidak. Untuk Indonesia sendiri, penerbitan buku bahan ajar ASEAN telah diterbitkan pada tahun 2021 lalu, yang merupakan hasil kerjasama antara Kemendikbudristek dan Kementerian Luar Negeri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Akan tetapi, program promosi

dan edukasi yang telah berjalan tersebut bukan tanpa hambatan, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh ASEAN sebagai organisasi yang bercita-cita menuju satu komunitas. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa latar belakang budaya, bahasa, ekonomi, hingga politik menjadi hambatan utama dalam internalisasi nilai dan identitas ASEAN sehingga dalam konteks agen dan struktur, relasi sosial dan konstruksi nilai-nilai bersama pada lapisan bawah masyarakat, terutama kalangan muda ASEAN sulit terbangun. Jadi tidak heran jika muncul persepsi yang menganggap bahwa ASEAN cenderung bersifat elitis, ketimbang egaliter.

Hasil penelitian lokal di Indonesia ialah mengenai kognisi dan pandangan dunia kelompok anak muda usia sekolah atau biasa disebut gen Z mencakup dari tiga cluster pengetahuan, yaitu pertama tentang masalah Rohingya di Myanmar, kedua tentang pengenalan organisasi ASEAN dan AICHR, serta upayanya dalam menagani masalah Rohingya dan cluster ketiga tentang peran Indonesia dalam menangani masalah Rohingya tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan untuk cluster pertama bahwa semua responden menjawab mengetahui tentang masalah Rohingya, ini membuktikan bahwa anak muda memiliki akses yang mudah terhadap informasi mengenai isu kemanusiaan, Namun sayangnya responden hanya sekedar mengetahui masalah Rohingya tapi tidak memahami masalah tersebut secara mendalam.

Cluster kedua mengenai ASEAN dan Lembaga HAM AICHR. Untuk pertanyaan tentang fungsi ASEAN dalam menyelesaikan masalah Rohingya, seluruh responden mengetahui tapi tidak memahami, sama seperti analisis di atas bahwa responden memiliki pengetahuan yang cukup tentang keberadaan ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara. Responden mengetahui masalah Rohingya di Myanmar dan mengetahui bahwa ASEAN bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun lagi-lagi responden tidak memahami esensi dari fungsi ASEAN dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini memiliki determinan yang berbeda dari analisis pada cluster pertama. Pengetahuan responden tentang ASEAN dan AICHR menunjukkan bagaimana norma dan identitas regional ASEAN dipahami dan diinternalisasi oleh kaum muda. Norma seperti kerja sama regional dan hak asasi manusia menjadi bagian penting dari identitas ASEAN. Misalnya, pengetahuan dan pemahaman tentang tujuan ASEAN dan negara anggotanya mencerminkan internalisasi nilai dan norma regional di kalangan anak muda. Akan tetapi, ketika pertanyaan yang diajukan materinya semakin mendalam, seperti upaya ASEAN dan lembaga AICHR dalam menangani masalah Rohingya jumlah responden yang menjawab mengetahui semakin berkurang drastis, bahkan lebih banyak yang tidak mengetahui. Artinya proses internalisasi norma ASEAN tidak maksimal pada poin ini. Hal ini semakin menguatkan analisis sebelumnya bahwa ada faktor eksternal dari aktor ASEAN dan pemerintah Indonesia sebagai agen dalam menyebarluaskan dan menginternalisasi nilai dan norma ASEAN itu sendiri. Pada paragraf awal sudah disebutkan bahwa pemerintah lewat Kemendikbudristek dan Kementerian Luar Negeri telah bekerja sama dalam mengeluarkan buku bahan ajar ASEAN untuk sekolah dasar dan menengah atas, ini bisa ditelusuri dengan jenis penelitian yang berbeda apakah proses sosialisasi norma ASEAN lewat bidang pendidikan (kurikulum) ini efektif atau tidak.

Pada cluster ketiga tentang upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Rohingya, responden yang menjawab tidak tahu hampir 90%, ini menunjukkan kurangnya perhatian anak muda terhadap peran Indonesia dikancah regional, sedangkan pertanyaan tentang peran Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar, 90 persen responden mengetahui, karena informasi ini sempat ramai diberbagai media massa di Indonesia dan responden hanya sekedar tahu tanpa memahami. Hal ini dapat dijelaskan bahwa responden yang merupakan anak muda ini memiliki karakter yang lekat dengan dunia digital dan tidak bisa lepas dari *gadget*. Mereka memiliki akses yang luas terhadap berbagai jenis informasi, termasuk informasi tentang masalah kemanusiaan. Namun sayangnya mereka hanya sekedar tahu tanpa tertarik untuk mendalami isu tersebut. Kemudian untuk organisasi ASEAN dan Lembaga HAM AICHR, responden hanya mengetahui keberadaan mereka namun tidak memahami peran dan fungsinya, begitupun dengan peran Indonesia dalam menangani masalah kemanusiaan tersebut. Artinya, tingkat pemahaman responden dalam masalah kemanusiaan ini sangat terbatas dan proses internalisasi norma ASEAN dan isu HAM kedalam individu juga belum maksimal.

Hasil dari survei lokal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden hanya sebatas mengetahui atau mengenal ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara, tanpa memahami isu yang dihadapi dan peran lembaga HAM ASEAN. Internalisasi nilai dan identitas ASEAN tidak berjalan maksimal dalam bidang pendidikan formal, meskipun bahan ajar materi ASEAN sudah terintegrasi dalam kurikulum sekolah menengah. Jika dibandingkan dengan hasil survey regional yang telah dijelaskan sebelumnya, hasilnya hampir memiliki kesamaan, bahwa masyarakat muda ASEAN sebagian besar belum merasa terikat dengan identitas ASEAN. Hal ini juga membuktikan bahwa proses internalisasi nilai dan identitas ASEAN oleh negara-negara anggotanya sebagai agen tidaklah bekerja secara maksimal sehingga perlu ada evaluasi serius untuk melihat kekurangan lembaga ASEAN dalam upaya pembangunan dan penguatan identitas ASEAN itu sendiri dan hambatan apa saja yang menjadi penghalang serta bagaimana meminimalisir hambatan-hambatan tersebut.

Hasil kajian ini berhasil menemukan relevansinya dari benang merah yang menghubungkan anggapan atau bangunan argumentasi yang menyatakan bahwa ASEAN lebih kepada sebuah komunitas yang dibayangkan ketimbang realitas yang konkrit, dengan kognisi masyarakat muda ASEAN yang cukup rendah terhadap rasa kepemilikan akan ASEAN sebagai bagian dari identitas diri mereka. Adanya latar belakang bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan konflik internal seperti isu Rohingya menjadi tantangan yang cukup besar yang dihadapi oleh ASEAN sebagai sebuah organisasi regional. Sebuah organisasi yang bercita-cita menjadi komunitas yang dapat menyatukan seluruh anggota masyarakat negaranya yang berlandaskan kepada nilai-nilai bersama yang tercantum dalam Piagam ASEAN. Selain itu, keinginan ASEAN menjadi komunitas regional yang berkomitmen pada perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan bersama adalah hasil dari proses interaksi sosial yang panjang yang terjadi sepanjang waktu. Kaum muda sebagai bagian dari masyarakat dan komunitas ASEAN, turut serta dalam membangun dan memperkuat identitas

ini melalui interaksi sosial mereka, terutama di bidang pendidikan. Kognisi dan pandangan dunia masyarakat muda tentang ASEAN dari berbagai riset dapat dikatakan masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa identitas ASEAN mungkin belum sepenuhnya terinternalisasi atau ditekankan dalam proses pendidikan dan sosial, terutama di Indonesia. Perspektif konstruktivisme membantu memahami bagaimana pemahaman dan nilai ASEAN terbentuk di kalangan kaum muda. Dengan mengakui pentingnya norma dan identitas sosial, pendekatan ini menyoroti perlunya upaya yang lebih besar untuk mengintegrasikan pemahaman tentang nilai dan identitas ASEAN kedalam masyarakat luas, terutama generasi penerus bangsa Indonesia. Edukasi dan promosi yang efektif baik secara langsung atau lewat media dapat memperkuat pemahaman ini dan memberdayakan masyarakat muda untuk menjadi agen perubahan dalam mempromosikan nilai dan norma tersebut di masa depan, untuk mencapai cita-cita satu komunitas ASEAN yang selama ini diimpikan. Dalam perspektif konstruktivisme, untuk mewujudkan komunitas ASEAN yang nyata, dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara aturan dan norma Lembaga ASEAN yang mengarahkan bagaimana agen dalam hal ini Negara anggota ASEAN dan warganegaranya. Senada dengan teori strukturasi yang dikemukakan oleh Giddens bahwa interaksi tersebut disebut dengan dualitas struktur (Giddens, 1984). Artinya implikasi dari terjadinya dualitas struktur, maka untuk mewujudkan sebuah komunitas dan menguatkan identitas regional membutuhkan upaya internalisasi nilai dan norma yang lebih maksimal dengan meminimalisir setiap hambatan yang ada, baik melalui jalur struktur yaitu sumberdaya dan norma lembaga ASEAN maupun *agency* yaitu negara-negara anggotanya termasuk warganegaranya.


Simpulan

Cita-cita ASEAN menuju satu komunitas ASEAN ditopang oleh nilai dan identitas regional yang merupakan hasil konstruksi sosial negara anggotanya. Meskipun tidak melalui proses yang berasal dari keterikatan yang bersifat alamiah, namun ASEAN berupaya untuk membangun identitas tersebut melalui narasi simbolis seperti symbol organisasi dan inisiatif kerja sama di berbagai bidang, serta program promosi dan edukasi. Pendekatan konstruktivisme menjelaskan proses konstruksi tersebut, yakni bagaimana relasi agen dan stuktur saling memengaruhi dan berproses untuk membangun identitas ASEAN yang berlandaskan pada nilai-nilai bersama yang tercantum dalam piagam ASEAN. Dari Analisis berbagai hasil riset dan survei yang dilakukan di 10 negara anggota ASEAN termasuk survei lokal di Indonesia, yang sebagian besar respondennya adalah kaum muda menunjukkan bahwa sebagian besar warga negara anggota ASEAN tidak memiliki rasa keterikatan dengan komunitas ASEAN. Kesadaran pemuda tentang ASEAN tidak selalu berbanding lurus dengan rasa keterikatan atau identitas positif terhadap ASEAN itu sendiri. Sebagian besar mereka mengetahui tentang Lembaga ASEAN melalui pendidikan formal, tetapi informasi ini sering kurang mendalam.

Hal tersebut menunjukkan bahwa proses atau upaya internalisasi nilai dan identitas ASEAN oleh negara anggota dan ASEAN sebagai agen tidaklah maksimal. Faktor kurang maksimalnya

edukasi dan promosi nilai-nilai bersama menjadi determinan yang memengaruhi rendahnya rasa keterikatan tersebut. Selain itu, latar belakang perbedaan budaya, bahasa, ekonomi, hingga politik menjadi tantangan utama yang menghambat proses internasionalisasi nilai dan identitas tersebut. Dapat disimpulkan, hasil kajian ini berhasil menemukan relevansinya dari benang merah yang menghubungkan anggapan atau bangunan argumentasi yang menyatakan bahwa ASEAN lebih kepada sebuah komunitas yang dibayangkan ketimbang realitas yang konkret, dengan kognisi masyarakat muda dinegara ASEAN yang cukup rendah terhadap rasa kepemilikan akan ASEAN sebagai bagian dari identitas diri mereka. Oleh karena itu, cita-cita ASEAN menuju penguatan identitas dan satu komunitas membutuhkan upaya internalisasi nilai dan norma yang lebih maksimal, dengan meminimalisir setiap hambatan yang ada, baik melalui jalur struktur yaitu sumber daya dan norma lembaga ASEAN maupun *agency* yaitu negara-negara anggotanya termasuk warganegaranya. Hal ini perlu pendekatan berbasis nilai yang merayakan keragaman budaya dan ekonomi, serta perlunya strategi lokal untuk menyampaikan pesan ASEAN dalam bahasa lokal. Hal ini penting untuk membangun rasa keterlibatan yang lebih kuat di kalangan pemuda sebagai bagian penting dari masyarakat ASEAN.

ORCHID ID

Rachmayani  <https://orcid.org/0009-0002-6540-0374>

Daftar Pustaka

- Acharya, A. (2021). Constructing security communities. In *Constructing a Security Community in Southeast Asia*. <https://doi.org/10.4324/9781315796673-14>
- Asean Youth Development Development*. (n.d.).
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.
- Chandra, A. C., Abdulrahim, R., & Almuttaqi, A. I. (2015). Non-state Actors ' Engagement with ASEAN : Current State of Play and Way Forward. *The Habibie Center*, 4(Building ASEAN Community: Political–Security and Socio-cultural Reflections), 221–246. https://www.eria.org/ASEAN_at_50_4B.3_Chandra-Almutaqqi-Ibrahim.pdf
- Chua, D., & Lim, E. (2017). The ASEAN Charter. In *Asean 50*. https://doi.org/10.1142/9789813221147_0005
- Donald, E. W. (1992). *International relations in Southeast Asia - the struggle for autonomy*. Rowman & Littlefield Inc.
- Engl56_Kj_Anderson_Communities.Pdf*. (n.d.).
- Faridv, H. (2020). *Fostering ASEAN Identity through Collaborative Efforts in Cultural Ecosystem*. <https://theaseanmagazine.asean.org/article/fostering-asean-identity-through-collaborative-efforts-in-cultural-ecosystem/>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (2017). International Norm Dynamics and Political Change. *Theories of International Relations*, 139–174. <https://doi.org/10.4324/9781315236339-14>

- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society-Outline Of The Theory Of Structuration* (Vol. 3). Polity Press.
- Huang, B. M., & Weatherall, M. (2019). *he Asian Barometer. February*, 37–40.
- Index, Y. D. (2021). *Understanding How Young People See ASEAN*.
- Indonesia, K. L. N. R. (2015). *Sejarah ASEAN*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/980/halaman_list_lainnya/sejarah
- Jones, L. (2010). *ASEAN's unchanged melody? The theory and practice of 'non-interference' in Southeast Asia*. https://www.researchgate.net/publication/248990162_ASEAN's_unchanged_melody_The_theory_and_practice_of_'non-interference'_in_Southeast_Asia
- Kivimäki, T. (2011). East Asian relative peace and the ASEAN Way. *International Relations of the Asia-Pacific*, 11(1), 57–85. <https://doi.org/10.1093/irap/lcq016>
- Mohamad Rosyidin. (n.d.). *The Power of Ideas : Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Tiara Wacana.
- Najmasani, N. (2023). Tiga Pilar Utama sebagai Landasan Masyarakat ASEAN. *Airlangga University*.
- Nonthasoot, S. (2019). *Report of the Asean Intergovernmental Commission on Human Rights Workshop on Rights-Based Approach To Regional Management Strategy for an Effective Environmental Impact Assessment. October 2017*. https://aichr.org/wp-content/uploads/2019/04/Report-AICHR-3rd-Environment-Workshop_Yangon_2017.pdf
- Pratikto, R. G., & Kristanty, S. (2017). Literasi Media Digital Generasi Z. *Universitas Budi Luhur*, 1–28.
- Prof.Dr. Phan Thi Hong Xuan. (2016). Raising the awareness of Southeast Asian identity in realizing the ASEAN Community. *University of Social Sciences and Humanities, VNU-HCM*, 1–9.
- Rakhmat, J. (2011). *Psikologi Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Seah, S., Lin, J., Martinus, M., Suvannaphakdy, S., Thi, P., & Thao, P. (2023). *SOUTHEAST ASIA 2023 Survey Report*. www.iseas.edu.sg
- Suriahadi, Y. (2021). ASEAN Identity. *ASEAN Identity, April*.
- The Founding of ASEAN*. (n.d.). <https://asean.org/the-founding-of-asean/>
- Wendt, A. (2005). Four sociologies of international politics. *Perspectives on World Politics: Third Edition*, 446–456. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511612183.002>